

**ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN  
DAERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**Amelia Sutriani**

**C0E013027**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “Analisis Kemandirian dan ketergantungan Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun”. Pembimbing dalam penelitian ini adalah Dr. H. Zamzami,SE., M.Si. dan Candra Mustika, SE., M.Si. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten sarolangun pada periode 2011-2015. Untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Sarolangun pada periode 2011-2015. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten sarolangun pada periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 2011-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 5,25%, dikategorikan kemampuannya rendah sekali, keadaan ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah masih sangat ketergantungan dengan dana transfer pusat. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten sarolangun selama tahun 2011-2015 rata-rata 84,78% dikategorikan tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Sarolangun masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Hubungan antara Kemandirian dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten sarolangun selama tahun 2011-2015 besaran kolerasi sebesar -0,899 mempunyai kolerasi positif, atau tinggi kemandirian maka diikuti dengan tingginya pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara Ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten sarolangun selama periode 2011-2015 besaran kolerasi 0,147, mempunyai kolerasi positif, atau tinggi ketergantungan keuangan daerah maka diikuti tingginya pertumbuhan ekonomi.

*Kata Kunci : Rasio Kemandirian ,Rasio Ketergantungan , Pertumbuhan Ekonomi*

This thesis entitled "Analysis of Independence and Dependency of Regional Finance and Its Relation to Economic Growth of Sarolangun Regency". Advisor in this research is Dr. H. Zamzami, SE., M.Sc. and Candra Mustika, SE., M.Sc. The purpose of this study is to analyze the level of financial independence of the district of Sarolangun in the period 2011-2015. To analyze the level of financial dependency of Sarolangun regency in the period of 2011-2015. To analyze the relationship between the level of independence and regional financial dependence with the economic growth of Sarolangun Regency in the period 2011-2015. This study uses secondary data (time series) from 2011-2015. The result of analysis shows that the ratio of Financial Independence of Sarolangun Regency in 2011-2015 is 5.25% on average, categorized as very low ability, this condition shows the level of regional capability is still very dependent on the central transfer fund. District Financial Dependency Ratio of Sarolangun Regency during 2011-2015 is 84.78% categorized high, this condition shows the dependency level of Sarolangun Regency is still high to the central government. Relationship between Independence with Economic Growth Sarolangun District during the year 2011-2015 the amount of correlation of -0.899 has a positive correlation, or high independence then followed by high economic growth. The relation between Dependence with economic growth of Sarolangun Regency during period 2011-2015 amount of correlation 0,147, have positive correlation, or high dependency of regional finance hence followed by high economic growth.

Keywords: Independence Ratio, Dependency Ratio, Economic Growth

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomi, yang pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Maka pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, oleh sebab itu diterapkan Otonomi Daerah maka setiap dapat melaksanakan wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk penyelenggaraan pembangunan suatu daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang dalam pengelolaan keuangan masih timbul masalah, hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan public serta juga merupakan tuntutan reformasi. Melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No 33 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan penuh pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau Negara.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Berdasarkan dengan hal tersebut maka dapat dilihat pertumbuhan ekonomi kabupaten sarolangun selama periode 2013-2015 pada tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Selama Tahun 2011-2015

No	Tahun	PDRB	Pertumbuhan (%)
1	2011	7.063.709.5	-
2	2012	7.663.231.9	8,49
3	2013	8.246.149.4	7,61
4	2014	8.675.076.9	5,20
5	2015	8.986.278.8	3,59

*Sumber: Bps Kabupaten Sarolangun Tahun 2015(Data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 8,49%, kemudian di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 7,61%, kemudian di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 5,20, kemudian di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten sarolangun sebesar 3,58.

### **Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Yani (2009) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Halim (2004), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, sedangkan Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

## **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis keuangan menurut Halim (2001) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

## **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2001).

## **Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio Ketergantungan Keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang dimaksud adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak serta dipublikasikan oleh pihak pertama. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dalam bentuk time series selama tahun 2011-2015. Data tersebut didapatkan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun.

### **Analisis Data**

1. Untuk Menjawab rumusan masalah pertama digunakan dengan metode analisis tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Abdul Halim (2008) yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

### Tingkat Kemampuan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian(%)</b>
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Untuk Menjawab rumusan masalah pertama digunakan dengan metode analisis tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Abdul Halim (2008) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.

### Tingkat Ketergantungan Daerah

<b>Ketergantungan Keuangan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

3. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga hubungan antara tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah kabupaten sarolangun dengan pertumbuhan ekonomi (sigiyono, 2000) yaitu sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)} \sqrt{(n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dimana :

- $r_{xy}$  = nilai kolerasi antara  $x_i$  dan  $y_i$   
 $n$  = jumlah periode  
 $x_i$  = kemandirian keuangan  
 $y$  = pertumbuhan ekonomi

Besarnya koefisien kolerasi ( $r$ ) antara dua variable ( $y$  dan  $x$ ) adalah nol sampai  $\pm 1$ . Apabila dua buah variable ( $x$  dan  $y$ ) mempunyai hubungan yang sempurna. Adapun interprestasi tingkat keeratan hubungan antara variable  $x$  dan  $y$  (variable bebas dan terikat), digunakan tabel interprestasi koefisien kolerasi dalam (sigiyono, 2000). Sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Interprestasi Koefisien Kolerasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

### Defenisi Operasional

1. Tingkat Kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.



2. Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun pada periode 2011-2015

Perhitungan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berguna untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Tabel 5.1

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun  
Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer	Rasio Kemandirian	Ket
2011	21.330.000.000	595.566.000.000	4,19	Rendah Sekali
2012	30.150.000.000	822.535.000.000	5,04	Rendah Sekali
2013	31.293.000.000	751.022.000.000	4,69	Rendah Sekali
2014	34.423.000.000	831.691.000.000	4,70	Rendah Sekali
2015	44.070.000.000	874.824.000.000	4,70	Rendah Sekali
Rata-rata			5,25	Rendah Sekali

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa hasil Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011 Rasio Kemandirian Daerah dengan besarnya persentase 4,19% dikategorikan kemampuannya rendah

sekali, pada tahun 2012 Rasio Kemandirian Daerah mengalami peningkatan karena dana transfer pusat naik dari tahun sebelumnya sebesar 5,04% dikategorikan rendah sekali, pada tahun 2013 Rasio Kemandirian Daerah mengalami penurunan diakibatkan dana Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer memiliki persentase sebesar 4,69% yang dikategorikan kemampuannya rendah sekali, tetapi pada tahun 2014 Rasio Kemandirian Daerah meningkat lagi besarnya persentase 4,70% dikategorikan kemampuannya rendah sekali, pada tahun 2015 Rasio Kemandirian Daerah besarnya persentase 4,70% dikategorikan kemampuannya rendah sekali. Rata-rata persentase Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2011-2015 sebesar 5,25% dan dalam kategori kemampuan rendah sekali.

**Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun pada Priode 2011-2015.**

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

Tabel 5.2

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2015

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>Ket</b>
2011	508.803.000.000	616.896.000.000	82,47	Tinggi
2012	597.600.000.000	852.685.000.000	70,08	Tinggi
2013	666.610.000.000	782.315.000.000	85,20	Tinggi
2014	731.409.000.000	866.114.000.000	84,44	Tinggi
2015	738.530.000.000	918.894.000.000	101,8	Tinggi

Rata-rata	84,78	Tinggi
-----------	-------	--------

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun (data diolah)*

Berdasarkan tabel 5.6. dapat dilihat bahwa hasil Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011 Rasio Ketergantungan Daerah dengan besarnya persentase 82,47% dikategorikan ketergantungannya tinggi, pada tahun 2012 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami penurunan dengan besarnya persentase 70,08% dikategorikan ketergantungannya tinggi, pada tahun 2013 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami peningkatan lagi dikarenakan tingginya Dana Alokasi Khusus dengan besarnya persentase 85,20% dikategorikan ketergantungannya tinggi, pada tahun 2014 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami penurunan lagi dikarenakan rendahnya Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dengan besarnya persentase 84,44% dikategorikan ketergantungannya tinggi, pada tahun 2015 Rasio Ketergantungan Daerah dengan besarnya persentase 101,8% dikategorikan ketergantungannya tinggi. Rata-rata persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 84,78% dikategorikan ketergantungannya tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Sarolangun masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

**Hubungan Tingkat Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun pada Periode 2011-2015.**

Guna mengetahui hubungan antara tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten sarolangun pada periode tahun 2011-2015. Digunakan Uji Kolerasi Pearson sebagai berikut :

Tabel 5.3  
Kolerasi Pearson

		Rasio Kemandirian	Rasio Ketergantungan	PE
RasioKemandirian	Pearson Correlation	1	-.183	.899*
	Sig. (2-tailed)		.769	.038
	N	5	5	5
RasioKetergantungan	Pearson Correlation	-.183	1	.148
	Sig. (2-tailed)	.769		.812
	N	5	5	5
PE	Pearson Correlation	.899*	.148	1
	Sig. (2-tailed)	.038	.812	
	N	5	5	5

Hasil pengujian dengan menggunakan uji Korelasi Pearson, rasio kemandirian dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif, atau semakin tinggi rasio kemandirian maka diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besaran korelasi sebesar 0,899 berarti menunjukkan bahwa korelasi antara kemandirian daerah menunjukkan hubungan sangat tinggi dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk tingkat signifikansinya menunjukkan nilai (probabilitas 0,038 lebih besar dari pada 0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Ketergantungan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif, atau semakin tinggi rasio ketergantungan maka diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besaran korelasi sebesar 0,148 berarti menunjukkan bahwa korelasi antara ketergantungan daerah menunjukkan hubungan sangat rendah dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk tingkat signifikansinya menunjukkan nilai (probabilitas 0,812 lebih besar dari pada 0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara ketergantungan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 5,25% dikategorikan kemampuannya rendah sekali, keadaan ini menunjukkan tingkat kemampuan daerah masih sangat ketergantungan dengan dana transfer pusat.
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 84,78% dikategorikan tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Sarolangun masih tinggi terhadap pemerintah pusat.
3. Rasio kemandirian dengan pertumbuhan ekonomi, mempunyai korelasi positif, atau tinggi tingkat kemandirian maka diikuti dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Besaran korelasi sebesar 0,899 menunjukkan bahwa korelasi antara kemandirian daerah menunjukkan hubungan sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan keuangan daerah dengan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif, atau tinggi ketergantungan keuangan daerah maka diikuti dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Besaran korelasi sebesar 0,147 dikategorikan sangat rendah berarti ketergantungan keuangan daerah tidak ada hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

### **6.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil analisis yang merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikan maupun secara ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.
2. Perlu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD.
3. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah adapun jenis penerimaan daerah lainnya, agar dapat meningkatkan sumber-sumber PAD dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Namun juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait termasuk desentralisasi kewenangan perizinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.
4. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Meningkatkan target PAD berdasarkan analisis potensi riil daerah dan didiskusikan pada tahap perencanaan, tidak hanya dengan menaikkan target, meningkatkan perolehan PAD terutama dengan mengoptimalkan pencapaian pada komponen pajak dan rest

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Said Zainal.2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan Dan Ekonomi Politik,Jakarta:Suara Bebas
- Bahrudin, Rudy.2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Stim YPKM:Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah .Jakarta.Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi Salemba Empat ,Jakarta
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Keuangan Daerah salemba empat: jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun. DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- Kuncoro, Mudrajat. 2002. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan, Strategi Dan Peluang. Jakarta, Penerbit Erlangga
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi sektor Publik Edisi 2.Jakarta : Salemba Empat.
- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah. Skripsi Fakultas Deponegoro.

- Hidayat, Rahmat.2013. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sarolangun. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-pokok Pemerintah di Daerah”
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers.